

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Peraturan Presiden Nomor 115 tahun 2015 yang dibentuk oleh presiden pada tanggal 20 oktober 2015, yang dimana presiden menunjuk Menteri Kelautan dan Perikanan menjadi komandan satgas. Menteri Kelautan dan Perikanan diberikan kewenangan yang prestisius, dimana komandan satgas mempunyai hak untuk mengendalikan alat militer milik TNI AL. Sedangkan dalam Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004 menjelaskan bahwa pengendalian alat militer hanya dapat dikendalikan oleh Panglima TNI dan Panglima TNI bertanggung jawab kepada presiden.

Penyelesaian polemik perpres ini dapat dilakukan dengan tiga opsi, pertama, *judicial review* yang dapat diusulkan oleh pihak-pihak yang terkait yang dalam hal ini adalah masyarakat dari kalangan akademisi ataupun masyarakat yang dirugikan secara langsung oleh perpres tersebut; kedua, revisi yang dapat dilakukan oleh pemerintah terkait dengan perpres ini, yang dimana awalnya Menteri Kelautan dan Perikanan yang menjadi komandan satgas, digantikan oleh Panglima TNI atau Wakil Panglima TNI dan atau KASAL; ketiga, yaitu penghapusan dimana pemerintah yang mengeluarkan perpres nomor 115 Tahun 2015 dengan mengeluarkan kembali perpres yang intinya diperuntukkan

mencabut Perpres Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*illegal fishing*).

B. Saran

1. Diharapkan dalam membuat suatu Peraturan Perundang-undangan seharusnya Menteri Dalam Negeri dan Mekopolhukam agar lebih selektif dalam membuat perundang-undangan yang baru, agar tidak terjadi lagi Peraturan Perundang-undangan seperti perpres yang bertentangan dengan undang-undang, dan sampai saat ini masih ada pepres yang bertentangan dengan undang-undang, agar tidak lagi terjadi masalah dalam system ketatanegaraan di Indonesia.
2. Diharapkan pemerintah melakukan penyesuaian dalam kewenangan pengendalian alat militer dengan melakukan revisi Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 agar memberikan kepastian hukum dalam kewenangan pengendalian alat militer.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anak Agung Banyu Prawita, *Pengantar Hubungan Internasional*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung: 2005
- Ann seidman, *Penyusunan RUU Dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis*, Elips, Jakarta: 2002
- Anonim, *Pemahaman Dasar Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta*
- Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Indo Hill, Jakarta: 1992
- CST Kansil, *Memahami Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, IKAPI, Jakarta: 2006
- Departemen Pertahanan Republik Indonesia II, *Buku Putih Pertahanan Indonesia*, Jakarta: 2008
- Ellydar Chaidir & Sudi Fahmi, *Hukum Perbandingan Konstitusi*, Total Media, Yogyakarta: 2010
- Fariad Ali, *Hukum Pemerintahan dan Proses Legislatif Indonesia*, PT Raja Grafindo, Jakarta: 1997
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Nusamedia dan Nuansa, Bandung: 2007
- Jimly Asshiddiqie & M. Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta: 2006
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta: 2010
- Ni'matul Huda, *Ilmu Negar*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2012
- Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing Cetakan Ke-1*, Sinar Grafika, Jakarta: 2015
- Pataniari Sihan, *Politik Hukum Pembentukan UU Pasca Amandemen UUD 1945*, Konpres, Jakarta: 2012

- Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2008
- Riza Damanik, dkk, *Menjala Ikan Terakhir (Sebuah Fakta Krisis di Laut Indonesia)*, Walhi Jakarta: 2008
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2006
- Soerjono Soekanto & Purnadi Purbacaraka, *Perihal Kaidah Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 1993
- Solly Lubis, *Landasan Dan Teknik Perundang-Undangan*, Mandat Maju, Bandung: 1989
- Sri Soemantri Martosoeignjo, *Bunga Rampai Hukum Tatanegara Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung: 1992
- Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, PT. Raja Grafindo, Jakarta: 2010

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan Dana Perikanan
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah

C. Sumber Lain

Abdul kadir Jaelani dan Udiyo Basuki, *Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing: Upaya Mencegah dan Memberantas Illegal Fishing dalam Membangun Poros Maritim Indonesia*, Supremasi Hukum, Vol 3 No.1, Juni 2014

Amirudin dan Zaenal Hasikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada Jakarta: 2006

Andre Putra Rumegang, *Kewenangan TNI AL Dalam Pemberantasan Tindak Illegal Fishing Menurut Perpres No.115 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Illegal (Illegal Fishing)*, Lex et Societatis, Vol.IV, No.2, Februari 2016

Arief Afrianto, *"Illegal Fishing Kejahatan Transnasional yang Dilupakan".2* Agustus 2017,
<http://news.detik.com/read/2009/10/09/080806/1218292/471/ilegalfishing-kejahatan-transnasional-yang-dilupakan>

Bagir Manan, *Dasar-dasar Ketatanegaraan Republik Indonesia Menurut UUD 1945*, Makalah Univ. Padjadjaran, Bandung, 1994

Hedi Sasrawan, *"Pengertian Sistem Menurut Para Ahli"*. 27 September 2017, <http://hedisasrawan.blogspot.com/2014/01/25-pengertian-sistem-menurut-para-ahli.html>.

John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2002

Kadi Saurip, *"Mengutamakan Rakyat-Wawancara Mayor Jendral TNI Saurip Kadi oleh Liem Siok Lan"*, 9 Agustus 2017, Wikipedia,https://id.m.wikipedia.org/wiki/Panglima_Tentara_Nasional_Indonesia,

Mirtusin, *Tesis: Tugas Pertahanan Tentara Nasional Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Banjarmasin, Program

Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Banjarmasin, 2010

Simela Vitor Muhamad, *Illegal Fishing Di Perairan Indonesia: Permasalahan dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral Di Kawasan*, *Politica*, Vol.3 No.1, Mei 2012

Siprianus Jewaru, "KKP Klaim Sejumlah Keberhasilan Satgas 115 Sepanjang Tahun 2016", 3 Agustus 2017
<http://www.jitunews.com/read/51405/kkp-klaim-sejumlah-keberhasilan-satgas-115-sepanjang-tahun-2016>

Sistem Informasi Pengawasan Ikan, "Hiu Macan Kembali Sergap 9 Kapal Ikan Vietnam". 3 Agustus 2017,
<http://simwaskan.djpsdkp.kkp.go.id/berita/baca/68/at>

Syahrial Syahbaini, "Makna dan Aktualisasi Sila Persatuan Indonesia Dalam Kehidupan Bernegara". 8 agustus 2017
<http://ueu5483.weblog.esaunggul.ac.id/2016/05/25/makna-dan-aktualisasi-sila-persatuan-indonesia-dalam-kehidupan-bernegara/>